

INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA

Oleh: Agus Maladi Irianto*

ABSTRACT

Integration includes the meaning of the formation of groups united by a common issue, whether ideological, economic, and social. The overture of national integration movement through the following article tends to create an awareness and a social form that cause many groups with each identity see themselves as one unity: the Indonesian Nation. To create an association in national integration formation, identity has double functions. In addition, the following article is trying to discuss about the challenges for Indonesia to develop the concept of national integration in order to deal with the concept of ethnocentrism, religiousism, and politicalism.

Keywords: national integration, ethnocentrism and conflict of interest

A. Pendahuluan

Negara dan bangsa Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini telah mempunyai sejumlah pengalaman. Di antara sejumlah pengalaman itulah, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan azas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan azas dan ideologi tersebut, menciptakan disintegrasi dan instabilisasi nasional. Perubahan dari Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) ditandai dengan pemberontakan PKI 30 September 1965 hingga lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Situasi perpolitikan nasional menjelang runtuhnya Orla ditandai dengan perebutan pengaruh di antara para elite politik negeri pada waktu itu. Kekuatan elite yang memiliki pengaruh pada waktu itu, di antaranya PKI, PNI, Masyumi dan militer (Angkatan Darat). Saat itu, PKI menjadi satu-satunya kelompok yang dituduh sebagai dalang yang melakukan kudeta pada tanggal 30 Oktober 1965 tersebut. Akibatnya, PKI tidak saja terdepak dari konstelasi politik (baik di kabinet maupun di parlemen), Namun para mahasiswa dan pelajar melalui KAMMI DAN KAPPI di bawah kendali Soeharto

berusaha menghancurkan PKI seakarnya.

Selanjut pemerintah Soeharto untuk mengendalikan pemerintahan berusaha untuk melakukan peleburan dan perampangan sejumlah oramas dan partai. Tanggal 9 Maret 1970 milsanya, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri d PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya. Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampangan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat tiga kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

Setelah Orba mampu berkuasa selama 32 tahun, akhirnya digantikan Pemerintahan Reformasi. Sikap otoriter-represif pemerintahan Orde Baru ini pun menimbulkan perlawanan demi perlawanan, yang memuncak pada peristiwa Mei 1998, yakni tergulingnya rezim pemerintahan Orba yang digantikan dengan Orde Reformasi. Mengapa Orba yang mampu berkuasa selama lebih dari 30 tahun akhirnya juga terguling?

Salah satu kesalahan Orba selama memegang kendali pemerintahan, adalah penerapan politik pemerintahan yang sentralistik, sebagai bentuk peredaman atas munculnya aksi separatis dari daerah-daerah. Ide dan gagasan dari daerah diusahakan untuk diredam, serta setiap aksi dari daerah ditanggapi dengan sikap otoriter-represif. Penyikapan yang dilakukan pemerintahan Orba tentu bertentangan dengan kodrat dan kondisi Indonesia yang selama ini dianugerahi sebagai suatu bangsa yang plural. Ia terdiri dari beratus-ratus pulau, bahasa, dan sukubangsa. Pluralitas sebagai kekayaan yang tiada tara bagi sebuah bangsa, justru tidak dikelola dengan baik. Ia dianggap sebagai bentuk gerakan politik yang lebih menekankan identitas kedaerahan, dan dianggap sebagai musuh terciptanya stabilitas bangsa. Maka, Orba yang lebih menekankan pada persoalan stabilitas pembangunan, cenderung tidak memberi ruang adanya politik identitas.

Ketika Era Reformasi mulai membuka kran demokrasi dan peluang besar daerah mengembangkan sistem desentralisasi, maka sejumlah daerah diberi kebebasan untuk membangun dan mengatur dirinya sendiri. Kebebasan yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan demokrasi ternyata justru memberi gambaran buram terhadap kondisi bangsa ini. Era Reformasi yang tidak memiliki *platform* secara jelas, justru menimbulkan ketidakmenentuan dan kekacauan. Acuan kehidupan bernegara (*governance*) dan kerukunan sosial (*social harmony*) menjadi berantakan dan menumbuhkan ketidakpatuhan sosial (*social*

disobedience). Dari sinilah tergambar tentang tindakan anarkis, pelanggaran moral, pelanggaran etika, dan meningkatnya kriminalitas secara kasat mata. Kondisi tersebut terus belarut-larut hingga hari ini, dan kesimpulannya tak menghasilkan solusi. Di kala hal ini berkepanjangan dan tidak jelas sampai kapan krisis akan berakhir, para pengamat hanya bisa mengatakan bahwa bangsa kita adalah “bangsa yang sedang sakit”, suatu kesimpulan yang tidak menawarkan solusi. Untuk itulah diperlukan, suatu strategi kebudayaan nasional senyampang sejak kemerdekaan hingga hari ini negeri ini belum memiliki adanya strategi kebudayaan.

B. Identitas dan Integrasi Nasional

Di masa awal Indonesia merdeka, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia (di antaranya adalah penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan seterusnya). Akan di era yang berkembang pada saat ini, apakah identitas nasional dapat ditandai dari ekspresi fisik tersebut atau dibutuhkan reinterpretasi tentang tentang identitas nasional?

Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks. Identitas dilihat dari aspek waktu bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang abadi. Sedangkan dilihat dari aspek ruang juga bukan hanya satu atau tunggal, tetapi terdiri dari berbagai lapisan identitas. Lapis-lapis identitas itu tergantung pada peran-peran yang dijalankan, keadaan objektif yang dihadapi, serta ditentukan pula dari cara menyikapi keadaan dan peran tersebut.¹

¹ Pendapat tersebut telah diaungkapkan oleh Agus Maladi Irianto melalui makalah berjudul “Kebudayaan Indonesia dan Kita Hari Ini” pada acara *Roundtable Discussion*

Dengan demikian, di satu sisi identitas akan terbentuk berdasarkan kemauan kita sendiri, sedangkan di sisi lain identitas akan sangat tergantung dari kekuatan-kekuatan objektif yang terjadi di sekitar yang mengharuskan kita untuk meresponsnya. Dan, respons tersebut secara tidak langsung juga memberi bentuk lain terhadap apa yang kita anggap sebagai diri kita saat ini.

Identitas bukanlah suatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Seperti halnya identitas kita pada saat ini, menunjukkan gambaran yang tidak tunggal tetapi sangat plural. Pluralitas pada perkembangan saat ini tidak lagi hanya dibatasi pada perbedaan etnis, profesi, latar belakang pendidikan, serta asal usul daerah. Pluralitas pada perkembangan saat ini justru lebih menunjuk pada persoalan kepentingan-kepentingan. Seseorang bisa berbeda dengan orang lain, bukan lantaran dia berasal dari etnis yang berbeda, profesi yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan asal usul daerah yang berbeda. Kepentingan masing-masing oranglah yang kemudian menyatukan identitas tersebut.

Sebagai contoh, penyatuan identitas yang dikonstruksi media massa – terutama industri penyiaran televisi. Orang bisa berbeda etnis, profesi, latar belakang pendidikan, dan asal usul daerah, namun mereka mempunyai kepentingan yang sama dalam bersikap dengan mengembangkan gaya hidup, lantaran dikonstruksi tayangan televisi. Interaksi antarindividu yang dikonstruksi tayangan televisi berlangsung sangat cepat. Ia telah membentuk gerakan arus besar tentang relasi-relasi antara yang

mendominasi dan yang terdominasi, antara yang mempengaruhi dan yang terpengaruhi, antara yang memprovokasi dan yang terprovokasi, antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, bahkan antara gambaran ruang yang bersifat publik dengan yang bersifat domestik.²

Tayangan televisi telah menjadi bagian dari refleksi kehidupan sehari-hari. Ia menjadi model dari sebuah habitus yang berperan aktif dalam ranah sosial. Ia telah menjadi fenomena komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dari karakteristik individu-individu yang kemudian menjadi objek dan subjeknya. Bahkan, tanpa sadar ia telah membangun hubungan-hubungan sosial melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi, dan kultural. Ruang dan waktu tak lagi menjadi pembatas dan kendala terjadinya perubahan. Teknologi komunikasi itu seolah menelusup dari ruang publik ke setiap individu hingga ruang-ruang privasi. Kita didorong untuk masuk dalam lorong waktu dan peristiwa yang nyaris tak terbatas, sejalan juga dengan tanda-tanda yang makin rumit dan tak terbatas. Pesawat televisi telah menjadi “totem” yang selalu ada di mana-mana. Di rumah-rumah reot tanpa WC dan kamar mandi, di kios-kios rokok, warung-warung kopi, hingga di sejumlah perumahan, pesawat televisi merupakan “berhala” yang selalu menghiasi ruang-ruang tersebut. Dari sinilah lahir kebudayaan massa yang cepat dan penuh perubahan. Di tengah kebudayaan massa yang serba cepat itulah sejumlah ekspresi tentang nilai, pengetahuan, norma, dan simbol, menandai kebudayaan masyarakat kita.

Bertolak dari sejumlah gambaran tersebut, identitas yang menyertai kita saat ini lebih ditandai oleh kepentingan yang kita kembangkan sendiri. Identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan

tentang “Penguatan Strategi Kebudayaan yang Berbasiskan Nilai-nilai Kemajemukan Untuk Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan Ditjiansosbud Lemhanas RI, tanggal 2 September 2010 di Jakarta.

² Contoh tersebut pernah diungkapkan Agus Maladi Irianto dalam makalah berjudul “Media dan Globalisasi” pada acara “Lokakarya Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa” di Kusuma Sahid Price Hotel Solo, yang diselenggarakan Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tanggal 5 Mei 2011

pola pikir (*mindset*) dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama pembangunan kebudayaan nasional. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan adanya integrasi nasional yang mampu memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing.³ Dengan demikian, integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia. Untuk menciptakan pergaulan dalam pembentukan integrasi nasional tersebut identitas justru berfungsi secara ganda.

Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan.⁴ Pada pihak lain, integrasi yang lebih luas hanya mungkin terbentuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya. Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integrasi yang lebih luas.

Ada beberapa contoh berikut untuk menjelaskan permasalahan tersebut, salah satu contoh adalah tentang keberadaan

³ Pendapat tersebut juga pernah dilontarkan antropolog, Meutia Farida Hatta dalam makalah berjudul "Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir" dalam **Kongres Kebudayaan V** di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003

⁴ Pendapat tersebut juga pernah dilontarkan Ignas Kleden dalam makalah berjudul "Identitas dan Integrasi" dalam **Kongres Kebudayaan V** di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003

Bahasa Indonesia di negeri ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari kepulauan Riau, dan pada awalnya menjadi suatu atribut dari identitas penduduk kepulauan Riau, bahasa itu kemudian berkembang menjadi Melayu Pasar, yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis yang bertemu di pasar dalam interaksi perdagangan. Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut muncul dengan komunitas baru dengan jaringan yang jauh lebih luas, yaitu kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa Melayu Pasar sebagai sarana komunikasi antara mereka. Akibatnya bahasa Melayu Pasar sebagai *lingua franca* kemudian menjadi ciri baru bagi suatu komunitas pengguna bahasa tersebut dan kemudian kembali berfungsi sebagai penunjuk identitas dari suatu jaringan kelompok-kelompok yang merasa dan ternyata dihubungkan satu sama lain oleh bahasa tersebut dan menemukan suatu kesatuan baru berupa integrasi yang lebih luas.

Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki lima (PKL) membentuk jaringan mereka ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapi operasi Satpol PP. Demi kepentingan tersebut, seorang PKL yang beretnik Minang akan bersatu dengan PKL-PKL beretnik lain. Singkat kata, integrasi pada dasarnya menyatukan lintas identitas untuk satu kepentingan bersama.

C. Intergrasi Nasional Versus Otonomi Daerah

Seperti telah dideskripsikan pada pembahasan terdahulu bahwa integrasi nasional pada dasarnya memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Konsep integrasi nasional pada dasarnya sejalan kondisi Indonesia pada saat ini. Ketika terjadi konflik antar-etnik, konflik antar-daerah,

konflik antar-agama, konflik antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia **dikaruniaai alam yang elok dengan iklim subtropis yang bersahabat dan tanah** yang subur. Ia adalah negara dengan 17.504 pulau, 1.068 suku bangsa, dan memiliki sedikitnya 665 bahasa daerah. Indonesia juga kaya dengan spesies langka. Baik flora maupun fauna. Ada mamalia, kupu-kupu, reptil, burung, unggas, dan amfibi yang berjumlah lebih dari 3.025 spesies. Tumbuhan yang hidup di Indonesia berjumlah sekitar 47.000 spesies atau setara dengan 12 persen dari seluruh spesies tumbuhan di dunia. Bahkan, dalam bidang seni dan budaya terdapat sedikitnya 300 gaya tari tradisional dari Sabang sampai Merauke.⁵

Bertolak dari gambaran tersebut, maka pada dasarnya pluralitas bagi bangsa Indonesia adalah takdir. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing anggota masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut. Gambaran pluralitas ini, kendati sudah merupakan takdir, namun akhir-akhir ini justru semakin memicu pertentangan di antara sejumlah anggota masyarakat. Bahkan, muncul adagium yang memicu konflik: “Kami versus kalian, aku versus kamu”, dan seterusnya. Maka muncullah faham sentrisme yang kemudian melahirkan misalnya, etnosentrisme, religisentrisme, politksentrisme, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, dalam budaya Jawa misalnya dikenal istilah “*nanding sarira*” memperbandingkan diri. Inilah pangkal munculnya kesombongan kolektif, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk berfikir bahwa budaya

etniknya lebih unggul dibandingkan dengan budaya etnik lain. Segala sudut sesuatu dilihat dari sudut pandang etniknya sendiri.

Etnosentrisme kian menguat justru ditopang dengan kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah dan pemekaran daerah menjadi berjalan seiring dengan menguatnya etnosentrisme. Sebagai contoh, Setiap provinsi dan setiap kabupaten ingin mendirikan sekolah sendiri baik pada tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan pada tingkat perguruan tinggi. Para siswa dan bahkan para mahasiswa yang belajar praktis berasal dari daerah yang sama dan juga dari latar belakang budaya yang sama. Hal ini dalam jangka panjang bukannya tak mungkin akan menyebabkan menyempitnya rasa integrasi nasional, karena integrasi cenderung lebih didasarkan pada faktor-faktor etnis dan faktor daerah semata. Pendirian sekolah di masing-masing daerah tidak dalam kapasitasnya untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah tersebut, tetapi justru lebih pada semangat menyelamatkan asset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Demikian pula demokrasi pemerintahan yang seharusnya dapat menjadi tempat pergaulan lintas-budaya dan lintas-etnis, sekarang menghadapi bahaya bahwa tiap daerah menuntut agar posisi-posisi birokratis ditempati oleh putra daerahnya sendiri. Sikap ini pun mungkin bukan tanpa sebab, sentralisme politik di Orde Baru untuk waktu yang cukup lama telah menjadikan birokrasi semata-mata sebagai alat pemerintah pusat dan bukan aparat yang menjadi pengatur hubungan di antara masyarakat dan negara. Birokrasi pemerintah daerah tidak memperhatikan kepentingan daerah, tetapi menjadi pelaksana kepentingan pusat di daerah. Daerah seakan-akan menjadi sapi perahan untuk pusat dan birokrasi daerah menjadi tukang susu bukan untuk daerah tetapi untuk pusat.

Sekalipun demikian, kondisi tersebut tidak selayaknya dibalas dengan, seakan-akan birokrasi pemerintahan hanyalah

⁵ Pendapat tersebut telah diungkapkan Agus Maladi Irianto pada artikel berjudul “Resistensi Kebudayaan Lokal Terhadap Hegemoni Global” pada Prosiding Seminar Nasional Menggali Kearifan Lokal di Indonesia (Sisi Maziah, editor). Semarang: Fasindo Press: 2012

melayani kepentingan daerah saja, bahkan tidak lagi menjadi perantara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, atau mesin penghubung kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Kalau penyempitan fungsi birokrasi ini terjadi maka bukan saja politik nasional menghadapi resiko politik yang didasarkan pada identitas, tetapi juga birokrasi.⁶

Berdasarkan sejumlah gambaran tersebut, konsep tentang integrasi nasional menjadi penting untuk dijadikan strategi kebudayaan bagi bangsa Indonesia yang telah berusia lebih dari enam dasa warsa ini. Strategi kebudayaan dalam hal ini mengacu pada kekuatan budaya yang bertolak pada kedekatan dan pandangan hidup pelaku kebudayaan dalam kaitannya dengan kompleksitas kebudayaan yang dianut. Dengan demikian, mengembangkan konsep integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan Indonesia pada dasarnya menyatukan visi dan misi di antara sejumlah kepentingan dan identitas masing-masing anggota masyarakat berlatar belakang kebudayaan yang kompleks.

D. Penutup

Merujuk sejumlah deskripsi yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu maka dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia. Konflik antar-etnik, konflik antar-daerah, konflik antar-agama, konflik antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain semestinya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pelaku konflik menyadari bahwa pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Kebijakan otonomi daerah yang kini marak di sejumlah penjuror negeri ini, justru menjadi penghambat cita-cita menerapkan konsep integrasi nasional. Cita-cita menerapkan konsep integrasi nasional akan terwujud, manakala sekelompok anggota masyarakat bersedia menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala kepentingan yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya. Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integrasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Meutia Farida, 2003 “Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir” dalam **Kongres Kebudayaan V** di Bukittinggi, 19-22 Oktober
- Irianto, Agus Maladi, 2010. “Kebudayaan Indonesia dan Kita Hari Ini” pada acara *Roundtable Discussion* tentang “Penguatan Strategi Kebudayaan yang Berbasis Nilai-nilai Kemajemukan Untuk Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan Ditjansosbud Lemhanas RI, tanggal 2 September di Jakarta.
- Irianto, Agus Maladi, 2011, “Media dan Globalisasi” pada acara “Lokakarya Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa” di Kusuma Sahid Price Hotel Solo, yang diselenggarakan Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tanggal 5 Mei
- Irianto, Agus Maladi, 2012, “Resistensi Kebudayaan Lokal Terhadap Hegemoni Global” pada Prosiding Seminar Nasional Menggali Kearifan Lokal di Indonesia (Sisi

⁶ Pendapat ini pernah diungkapkan Agus Maladi Irianto pada Seminar Nasional “Penguatan Pilar-pilar Berbangsa dan Bernegara Sebagai Kesiapan Eksistensi Menuju Kejayaan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya bekerja sama dengan Deputi Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden RI, di Hotel Dafam Semarang, tanggal 29 September 2012.

Maziah, editor). Semarang: Fasindo Press: 2012

Irianto, Agus Maladi, 2012, “Semangat Multikultural, Meredam Strategi Balas Dendam” pada Seminar Nasional “Penguatan Pilar-pilar Berbangsa dan Bernegara Sebagai Kesiapan Eksistensi Menuju Kejayaan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya bekerja sama dengan Deputi Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden RI, di Hotel Dafam Semarang, tanggal 29 September

Kleden, Ignas, 2003, “Identitas dan Integrasi” dalam **Kongres Kebudayaan V** di Bukittinggi, 19-22 Oktober

